

PENDAHULUAN

Collaborative governance adalah sebuah pendekatan dalam tata kelola yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, dalam proses pembuatan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan sinergi antara berbagai pihak melalui partisipasi yang aktif, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan mengedepankan keterlibatan semua pihak yang berkepentingan, *collaborative governance* memungkinkan terbentuknya solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Pendekatan ini dianggap sebagai solusi efektif untuk mengatasi masalah kompleks yang memerlukan kerjasama dan koordinasi multi-pihak. Misalnya, dalam konteks pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), *collaborative governance* dapat memainkan peran penting dengan mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, lembaga keuangan, dan komunitas lokal untuk bersama-sama merumuskan kebijakan yang mendukung pertumbuhan UMKM. Melalui proses ini, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya lebih relevan dan tepat sasaran, tetapi juga memiliki dukungan luas dari berbagai *stakeholder*, yang pada gilirannya meningkatkan peluang keberhasilan implementasi.

Collaborative governance memberikan kerangka kerja yang memungkinkan setiap pihak untuk berkontribusi sesuai dengan peran dan kapasitas masing-masing. Dalam konteks pengembangan UMKM, keberhasilan pelaksanaannya memerlukan kolaborasi aktif antara pemerintah yang menyediakan regulasi dan fasilitasi, pelaku UMKM sebagai aktor utama penggerak ekonomi lokal, serta lembaga pendukung lainnya yang berfungsi menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan yang dirumuskan.

Melalui pendekatan ini, pemerintah dapat merancang kebijakan yang inklusif, seperti peningkatan akses pembiayaan, pelatihan, dan kemitraan strategis, yang disesuaikan dengan kebutuhan konkret pelaku UMKM. Sementara itu, peran komunitas lokal menjadi faktor penting dalam memastikan

keberlanjutan kebijakan melalui penguatan jaringan sosial dan dukungan langsung kepada UMKM.

Pendekatan *collaborative governance* juga mengutamakan transparansi dan akuntabilitas di setiap tahap, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Dengan adanya komunikasi yang terbuka, kepercayaan di antara para stakeholders dapat terbangun, menciptakan hubungan kemitraan yang solid dan berorientasi pada tujuan bersama. Dimensi horizontal dalam *collaborative governance*, yang menekankan kesetaraan di antara para stakeholders, menjadi kunci untuk memastikan proses pengambilan keputusan berjalan tanpa dominasi pihak tertentu.

Menurut Ansel dan Gash (2008), *Collaborative Governance* digunakan sebagai strategi baru untuk menyatukan seluruh pemangku kepentingan dalam satu tempat dan mencapai konsensus mengenai cara menyelesaikan permasalahan publik. Ide dasar yang dapat dipahami adalah adanya aktor-aktor swasta dan publik (pemerintah dan non-pemerintah) yang memiliki kepedulian yang sama dan bekerja sama untuk berhasil menyelesaikan permasalahan publik. Ide ini juga merupakan strategi umum dalam literatur administrasi publik (Jin Lee & Sang Yoo, 2012). Dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM, *collaborative governance* dapat melibatkan berbagai inisiatif seperti penyediaan akses pembiayaan, peningkatan kapasitas melalui pelatihan, dan penciptaan ekosistem bisnis yang kondusif. Pemerintah dapat menyediakan kerangka regulasi yang mendukung dan program-program insentif, sementara sektor swasta bisa berkontribusi dengan investasi dan teknologi. Masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah dapat memainkan peran dalam advokasi dan pemberdayaan komunitas lokal. Dengan demikian, setiap pihak membawa keahlian dan sumber daya masing-masing ke meja kolaborasi, menciptakan solusi yang lebih inovatif dan efektif untuk tantangan yang dihadapi UMKM.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, yang tercermin dari kontribusinya yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) secara nasional. Selain itu, Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM juga menjadi penggerak utama dalam penyerapan tenaga kerja, mempekerjakan sebagian besar angkatan kerja. Di tingkat lokal, Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM sering menjadi tulang punggung ekonomi, memberikan peluang kerja, mengurangi tingkat kemiskinan, dan mendukung distribusi pendapatan yang lebih merata di komunitas-komunitas.

Meskipun memiliki peran penting ini, Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM sering menghadapi berbagai tantangan yang menghambat perkembangan mereka. Tantangan-tantangan ini termasuk keterbatasan akses ke modal, kendala dalam mengadopsi teknologi baru, kesulitan dalam mencapai pasar yang lebih luas, dan rendahnya kapasitas manajerial di kalangan pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk memberikan dukungan yang lebih besar kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM agar mereka dapat berkembang secara berkelanjutan dan berkontribusi lebih banyak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas, jumlah UMKM di Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan signifikan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2021, terdapat 86.975 UMKM di Kabupaten Banyumas yang menyerap 129.182 tenaga kerja. Jumlah UMKM binaan dinas juga meningkat secara signifikan, dari 6.720 pada tahun 2017 menjadi 24.978 pada tahun 2021. Berikut adalah data jumlah UMKM, UMKM binaan dinas, dan jumlah tenaga kerja dari tahun 2017 hingga 2021:

Table 1 Data UMKM Binaan Kabupaten Banyumas Tahun 2017-2021

Deskripsi Data	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah UMKM	66.973	85.984	86.228	86..645	86.975
Jumlah UMKM Binaan Dinas	6.720	6.720	8.653	19.865	24.978
Jumlah Tenaga Kerja	95.955	126.986	128.118	128.952	129.182

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas Tahun 2017-2021.

Kecamatan Kedungbanteng adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Banyumas dengan potensi UMKM yang cukup besar. Kecamatan Kedungbanteng memiliki 2.636 UMKM mikro tanpa UMKM kecil atau menengah, menunjukkan potensi besar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Sebagai perbandingan, Kecamatan Cilongok memiliki jumlah UMKM mikro yang lebih besar, yaitu 6.149, serta satu UMKM menengah. Kecamatan Wangon menonjol dengan 41 UMKM menengah, menunjukkan keragaman dan potensi pertumbuhan UMKM yang berbeda di setiap kecamatan.

Aspikmas Kecamatan Kedungbanteng mencatat total 82 pelaku UMKM tergabung pada tahun 2022, menunjukkan adanya organisasi lokal yang berperan dalam mendukung pengembangan UMKM di tingkat desa.

Table 2 Data Aspikmas Kecamatan Kedungbanteng

Desa	Jumlah UMKM tergabung	Tahun
Beji	13	2022
Karang Nangka	12	2022
Windujaya	10	2022
Kalikesur	9	2022
Keniten	8	2022
Dawuhan Wetan	7	2022
Kalisalak	5	2022
Karang Salam	5	2022
Melung	4	2022
Kebocoran	3	2022
Kutaliman	2	2022
Dawuhan Kulon	2	2022
Kedungbanteng	1	2022
Baseh	1	2022
Jumlah Total	82 Pelaku UMKM tergabung	

Sumber Data: Sekretaris Aspikmas Kecamatan Kedungbanteng.

Dalam upaya mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Pemerintah Kabupaten Banyumas telah berupaya mendukung pengembangan UMKM melalui berbagai program dan kebijakan. Program pelatihan kewirausahaan, akses pembiayaan melalui kredit usaha rakyat, serta fasilitasi pameran dan promosi produk UMKM merupakan beberapa inisiatif yang telah dilaksanakan. Kolaborasi dengan sektor swasta dan akademisi juga menjadi strategi penting dalam mendukung UMKM di daerah ini. Salah satu contoh sektor swasta yang terlibat aktif adalah ASPIKMAS (Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil Menengah Banyumas). ASPIKMAS berperan dalam memberikan pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi akses pasar bagi UMKM, serta menjembatani komunikasi antara UMKM dan pemerintah untuk memastikan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Selain itu, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM (Dinakerkop UKM) Kabupaten Banyumas mengelola program pelatihan dan pembiayaan untuk UMKM.

Penerapan *collaborative governance* dalam pengembangan UMKM telah terbukti efektif di berbagai daerah. Sebagai contoh, di Kabupaten Banyuwangi, penerapan *collaborative governance* antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan komunitas lokal berhasil meningkatkan daya saing UMKM melalui inovasi produk dan akses pasar yang lebih luas. Program seperti "Smart Kampung" di Banyuwangi memanfaatkan teknologi untuk mendukung UMKM, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung digitalisasi UMKM. Hasil positif dari berbagai daerah ini menjadi dasar untuk mencoba menerapkan pendekatan serupa di Kecamatan Kedungbanteng. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta seperti Aspikmas (Asosiasi Pedagang Mikro Kecil Kabupaten Banyumas) diharapkan pengembangan UMKM di Kedungbanteng dapat lebih optimal, meningkatkan daya saing produk lokal, serta membuka akses pasar yang lebih luas.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan “*Collaborative Governance dalam pengembangan UMKM di Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas*”. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan kolaborasi yang efektif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja dan daya saing UMKM di daerah tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berfokus pada analisis mendalam dan pengumpulan informasi melalui wawancara dan observasi. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sosial dan interaksi antar pemangku kepentingan dalam pengembangan UMKM secara lebih holistik. Lokasi penelitian ditetapkan di Kecamatan Kedungbanteng, mengingat kecamatan ini memiliki jumlah UMKM yang signifikan dan merupakan bagian penting dari perekonomian lokal. Dengan memilih lokasi ini, penelitian bertujuan untuk mengkaji potensi UMKM serta upaya pemberdayaan yang dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

Sasaran penelitian mencakup perwakilan dari pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat dan pelaku UMKM. Perwakilan pemerintah yang dimaksud adalah individu dari lembaga atau dinas terkait yang mengelola program pemberdayaan UMKM. Sektor swasta meliputi pengusaha atau pemilik usaha yang terlibat dalam inisiatif kemitraan, sedangkan masyarakat dan pelaku UMKM adalah individu yang menerima manfaat dari program pemberdayaan.

Fokus penelitian ini adalah penerapan *collaborative governance* dalam pemberdayaan UMKM di Kecamatan Kedungbanteng. Teori yang digunakan sebagai landasan adalah teori *collaborative governance* yang dikembangkan oleh Edward P. Weber, Nicholas P. Lovrich, dan Michael Gaffney (2005). Teori ini menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam mengatasi masalah publik, serta memberikan kerangka kerja untuk